

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Permasalahan banjir masih menghantui warga Kota Pekalongan, bahkan setiap musim hujan terjadi hampir sebagian Kota Pekalongan tersebut tergenang air, terutama pada jalan-jalan protokol serta pemukiman. Banjir dan genangan air pada sejumlah titik Kota Pekalongan masih terus terjadi. contohnya, banjir di daerah Pekalongan Utara yang menjadi langganan genangan air saat turun hujan dengan intensitas tinggi. Pengelolaan tata ruang perkotaan yang serampangan, penggunaan areal serapan air yang masif buat pemukiman, sampai perambahan hutan pada kawasan hulu sungai ditengarai menjadi penyebab melemahnya daya dukung lingkungan saat terjadinya hujan deras. Sejumlah tempat terendam air, mulai dari pusat kota sampai area pemukiman warga. Tak tanggung, ketinggian air mencapai 1 meter hingga 1,5 meter. Hal yang paling parah terjadi pada akhir 2023 curah hujan lebat disertai angin kencang melanda Kota membuat hampir semua sudut kota mengalami banjir. Hal ini ditimbulkan karena meluapnya DAS dan naiknya air laut. Ruas titik banjir terparah terjadi di 3 kawasan Kecamatan di Kota Pekalongan. Pada lokasi tersebut air menggenangi jalan kurang lebih 20 cm, sebagai akibatnya banyak kendaraan yang sangat ekstra waspada saat akan melewati kawasan tersebut. Bahkan akibat banjir ini selain jalanan macet parah, sejumlah sekolah juga terpaksa harus meliburkan siswanya atau memberikan toleransi datang telat, sebab jalan macet parah diakibatkan banjir.

Dalam upaya pencegahan banjir di Kota Pekalongan, pemerintahan Afzan Arslan dalam masa jabatan 2021-2024 mengagendakan berbagai upaya pencegahan baik yang secara langsung berdampak pada pencegahan maupun pencegahan yang bersifat jangka panjang, ada dua hal yang menjadi sorotan peneliti yaitu kebijakan advokasi yang menurut peneliti program jangka panjang pencegahan banjir dan Kebijakan sumur resapan yang dapat mencegah banjir

secara langsung. Dalam hal pencegahan jangka panjang, Pemerintah Kota Pekalongan berusaha untuk mendekati berbagai pihak untuk program jangka panjang pencegahan bencana, Di Kota Pekalongan sebelumnya, kebijakan yang diambil selalu merujuk pada peraturan daerah. Kebijakan yang diterapkan tidak terlepas dari koordinasi dengan pihak pemerintah Kota Pekalongan dan instansi terkait lainnya. Mengenai sektor lingkungan hidup, selama ini belum ada aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pekalongan secara spesifik. Aturan-aturan yang dijalankan hanya mengikut pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pekalongan. Meski demikian, pemerintah Kota Pekalongan tetap melakukan upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup, serta mendukung desa desa yang memiliki rencana untuk menerbitkan kebijakan atau Peraturan Desa dan atau Peraturan Kepala Desa (Perdes/Perkades) terkait pengelolaan lingkungan hidup di berbagai sektor.

Selain itu tanggap darurat juga dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi bencana saat terjadi. Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana. Selain itu Pemerintah Kota Pekalongan melakukan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak banjir dengan cara menyiapkan tempat pengungsian, kebutuhan pangan, dan pengobatan terhadap korban bencana banjir dengan cara mengkoordinir instansi terkait. Selama kegiatan tanggap darurat, upaya yang dilakukan adalah menanggulangi bencana yang terjadi sesuai dengan sifat dan jenisnya. Penanggulangan bencana memerlukan keahlian dan pendekatan khusus menurut kondisi dan skala kejadian. Dalam hal ini Pemerintah Kota Pekalongan dituntut untuk dapat memetakan segala sumber daya yang ada untuk menanggulangi bencana. Seperti yang sudah diungkapkan pula bahwa tugas Pemerintah Kota Pekalongan disini adalah sebagai koordinator dari berbagai unit yang terlibat maka Pemerintah

Daerah Kota Pekalongan bertugas untuk mengerahkan *source* yang telah dihimpun untuk ditempatkan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

4.2 Saran

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Pekalongan dengan judul penelitian “*Penanggulangan Banjir Abadi Di Kota Pekalongan Masa Pemerintahan Afzan Arslan Djunaidi Periode 2021-2024*”. Peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dari hasil penelitian tersebut, dari penelitian ini analisa yang digunakan menggunakan analisa dari sudut pandang politik, bagi peneliti hal tersebut belum cukup. Diperlukan berbagai pendekatan untuk dapat menyelesaikan persolan banjir.
2. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga peneliti terbuka dengan berbagai kritikan dari berbagai pihak, peneliti berharap dengan adanya skripsi ini dapat menambah khazanah pemahaman kebijakan public dalam menghadapi bannjir yang setiap tahun melanda negeri ini.